



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 442 /2023
TENTANG

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa salah satu tujuan Rencana Pembangunan Daerah Aceh Singkil Tahun 2023-2026 adalah mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas dan fungsional yang dijabarkan kedalam road map reformasi birokrasi dan tingkat pencapaiannya diukur dari rencana aksi reformasi birokrasi, perlu menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisioner Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);



10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023.
- KESATU : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu digunakan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam implementasi Reformasi Birokrasi di Kabupaten Aceh Singki.
- KETIGA : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai ruang lingkup :
- a. rencana aksi reformasi birokrasi general;
 - b. rencana aksi reformasi birokrasi tematik;
 - c. target-target kinerja; dan
 - d. perangkat daerah koordinator dan perangkat daerah pelaksana.
- KEEMPAT : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap triwulan.
- KELIMA : Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang menjadi Koordinator indikator melaporkan progres pelaksanaan kegiatan rencana aksi secara triwulan kepada Bupati Aceh Singkil melalui Sekretaris Daerah Aceh u.p Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- KEENAM : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat dilakukan perubahan karena :
- a. terjadi perubahan roadmap Reformasi Birokrasi Kabupaten Aceh Singkil;

✓

- b. adanya perubahan tema atau fokus pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang di tetapkan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah Kabupaten Aceh Singkil; dan
- c. hasil monitoring dan evaluasi rencana aksi roadmap Reformasi Birokrasi.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Tahun Anggaran 2023 dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 10 November 2023

26 Rabiul Akhir 1445 H
Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

AZMI

↓

6	Penyusunan Rancangan RKKPD	Dokumen	Jumlah Rancangan RKKPD yang tersusun	1	-	-	-	-	1	Rp199,750,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh Singkil	Seluruh Unit Kerja
7	Pelaksanaan Musrenbang RKKPD	Berita Acara	Jumlah Berita Acara Kesepakatan Musrenbang RKKPD	-	1	-	-	-	1	Rp203,476,550	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh Singkil	Seluruh Unit Kerja
8	Penelaahan Pokok Pikiran DPPA	Pokir	Jumlah POKIR yang ditelaah	505	-	-	-	-	505	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh Singkil	
9	Penyusunan Rancangan Akhir RKKPD	Dokumen	Jumlah Rancangan Akhir RKKPD yang tersusun	-	1	-	-	-	1	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh Singkil	Seluruh Unit Kerja
10	Pelaksanaan Fasilitasi Rancangan Akhir RKKPD	Hasil Fasilitasi	Jumlah Hasil Fasilitasi Rancangan Akhir RKKPD	-	1	-	-	-	1	Rp19,796,800	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh Singkil	Seluruh Unit Kerja
11	Penetapan RKKPD	Dokumen	Jumlah RKKPD yang ditetapkan	-	1	-	-	-	1	Rp45,899,365	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh Singkil	Seluruh Unit Kerja
12	Penyusunan Rancangan Awal RUPA 2025-2045	Dokumen	Jumlah Rancangan Awal RUPA 2025-2045 yang tersusun	-	-	-	1	-	1	Rp11,720,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh Singkil	Seluruh Unit Kerja
13	FGD dengan berbagai pemangku kepentingan	Notulensi	Jumlah Notulensi FGD yang tersedia	-	-	5	-	-	5	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh Singkil	Seluruh Unit Kerja
14	Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Ramwal RUPA 2025-2045	Berita Acara	Jumlah Berita Acara Forum Konsultasi Publik RUPA 2025-2045	-	-	1	-	-	1	Rp15,750,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh Singkil	Seluruh Unit Kerja
15	Penyusunan Rancangan Perubahan RKKPD	Dokumen	Jumlah Rancangan Perubahan RKKPD yang tersusun	-	-	1	-	-	1	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh Singkil	Seluruh Unit Kerja
16	Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKKPD	Dokumen	Jumlah Rancangan Akhir Perubahan RKKPD yang tersusun	-	-	1	-	-	1	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh Singkil	Seluruh Unit Kerja
17	Fasilitasi Rancangan Akhir Perubahan RKKPD	Hasil Fasilitasi	Jumlah Hasil Fasilitasi Perubahan RKKPD yang tersedia	-	-	1	-	-	1	Rp19,796,800	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh Singkil	Seluruh Unit Kerja
18	Penetapan Perubahan RKKPD	Dokumen	Jumlah Perubahan RKKPD yang ditetapkan	-	-	1	-	-	1	Rp19,813,500	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh Singkil	Seluruh Unit Kerja
19	Reviu Renja SKPA	Dokumen	Jumlah dokumen Renja SKPA yang di reviu	-	-	46	-	-	-	-	Inspektora Aceh Singkil	Seluruh Unit Kerja
20	Penyusunan dan penyempurnaan dokumen perjanjian kinerja Pemerintah Aceh Singkil tepat waktu	Dokumen	Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Aceh Singkil	1	-	-	-	-	1	-	Biro Organisasi	Seluruh Unit Kerja
1	Fasilitasi dan Penyusunan Pohon Kinerja SKPK	SKPK	Jumlah SKPK yang memiliki Pohon Kinerja	46	-	-	-	-	46	-	Bagian Organisasi SetdaKab	SKPK
2	Fasilitasi dan Penyusunan cawacawing kinerja SKPK	SKPK	Jumlah SKPK yang memiliki cawacawing kinerja Esesion II sampai dengan individu	46	-	-	-	-	46	-	Bagian Organisasi SetdaKab-Inspektora - Bappeda	SKPK terkait
3	Penyusunan rencana Aksi Sistem AKIP Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil	Dokumen	Jumlah rencana aksi Sistem AKIP Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil	-	1	-	-	-	1	-	Bagian Organisasi SetdaKab	SKPK
4	Fasilitasi penyusunan LKJ SKPK dan Sekretaris Daerah	SKPK/Bagian	Jumlah SKPK dan Bagian yang difasilitasi	54	-	-	-	-	54	Rp5,005,700	Bagian Organisasi SetdaKab	SKPK dan Bagian di SetdaKab
5	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil	Dokumen	Jumlah dokumen laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten	1	-	-	-	-	1	Rp10,430,700	Bagian Organisasi SetdaKab	SKPK

Nilai SAKIP

65,00

Baik

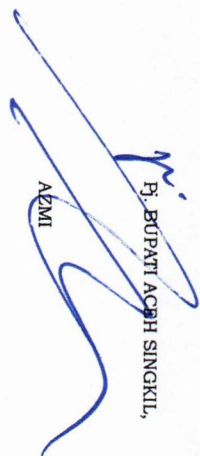
2

11	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	70%	1	Pembentukan Tim Penilaian Internal/Evaluasi Penyelenggara Statistik Sektoral Pemerintahan Kabupaten	Dokumen	Jumlah peraturan daerah terkait implementasi Statistik Sektoral	0	1	0	0	1	Rp29,950,200	Diskominfo	Seluruh Unit Kerja
				2	Pembinaan/pendampingan produsen data (SKPj) dalam pemenuhan prinsip SDI	Kegiatan	Jumlah kegiatan pembinaan dan pendampingan yang dilaksanakan	1	1	1	1	4			
				3	Pengumpulan data (SKPj) selaku produsen dalam proses menghasilkan data statistik sektoral yang berkualitas	dokumen	Persentase dokumen elemen data sektoral yang tervalidasi	50%	60%	65%	70%	70%			
				4	Proses pemeriksaan dan verifikasi data statistik sektoral (SKPj)	dokumen	Tersedianya buku profil daerah	50%	60%	65%	70%	70%			
				5	Publikasi Data Statistik Sektoral Daerah	dokumen	Tersedianya resume pelaksanaan kegiatan	0	0	0	1	1			
12	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	48,04	1	Pasang-rumahnya Penyedia Barang / Jasa melalui Tender, Berdasarkan Laporan E-Procurement	Kegiatan	Tersedianya resume pelaksanaan kegiatan	25%	25%	25%	25%	100%	Rp54,998,000	Bagian PBJ S.d.kab	Seluruh Unit Kerja
				2	Mengelola Sistem E-Procurement	Kegiatan:	Pengadaan Barang/Jasa di Daerah	25%	25%	25%	25%	100%			
				3	Menyediakan Pelatihan Kepada PJK atau Panitia dan Penyedia Barang/Jasa	kegiatan	Terpenyuhnya dan Terpeliharanya Sarana SPSE	25%	25%	25%	25%	100%			
				4	Menyediakan sarana akses internet bagi PJK atau Panitia dan Penyedia barang/jasa	kegiatan	Tersedianya resume pelaksanaan kegiatan	25%	25%	25%	25%	100%			
				5	Meningkatkan Kapasitas Pelaku Usaha	kegiatan	Tersedianya resume pelaksanaan kegiatan	25%	25%	25%	25%	100%			
				6	Peningkatan kompetensi Pengelola PBJ	kegiatan	Tersedianya resume pelaksanaan kegiatan	25%	25%	25%	25%	100%			
				7	Facilitasi Advokasi dan Manajemen Risiko Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	kegiatan	Tersedianya resume pelaksanaan kegiatan	25%	25%	25%	25%	100%			
13	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	1 Unit	1	Pencanangan Deklarasi Komitmen Pembangunan Zona Integritas	Dokumen	Tersedianya resume pelaksanaan kegiatan	-	1	-	-	1	47,612,075	Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil
				2	Penyusunan SK Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Provinsi Aceh	Dokumen	Tersedianya resume pelaksanaan kegiatan	-	1	-	-	1			
14	Penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern	Tingkat Maturitas SIPP		1	Penunasan Kebijakan teknis	dokumen	Tersedianya resume pelaksanaan kegiatan	-	-	-	-	100%	Rp38,986,000	Inspektorat	Seluruh Unit Kerja
15	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)		1	pengelolaan survei penilaian integritas	dokumen	Tersedianya resume pelaksanaan kegiatan	-	50%	25%	25%	100%	Rp5,328,000	Inspektorat	Seluruh Unit Kerja
SASARAN STRATEGIS 2: Terciptanya Budaya Birokrasi BerKHLIAK dengan ASN yang Profesional															
1	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit		1	Melaksanakan Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit ASN di Kabupaten Aceh Singkil	Dokumen Penilaian	Jumlah dokumen	1				1	Rp18,914,500	BKPSDM	Seluruh Unit Kerja

a.	Penguatan Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	65	1	Melakukan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil	nilai rata rata ASN	Semua ASN Mendapatkan Peningkatan/ Penguatan kompetensi Sesuai Jenjang dan dan Jabatan serta memenuhi 20 JP setiap Tahun				1	1						BKPSDM	Seluruh Unit Kerja				
				1	Melaksanakan Penilaian Indeks Implementasi Norma Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN	Dokumen	Jumlah dokumen					1	1	Rp16.011.000	BKPSDM	Seluruh Unit Kerja							
b.	Implementasi NSPK Manajemen ASN	Indeks NSPK	70	1	Melaksanakan Penilaian Indeks Implementasi Norma Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN	Dokumen	Jumlah dokumen				1	1						BKPSDM	Seluruh Unit Kerja				
				1	Melaksanakan Penilaian Indeks Implementasi Norma Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN	Dokumen	Jumlah dokumen					1	1							BKPSDM	Seluruh Unit Kerja		
c.	Penguatan Jabatan Fungsional	Tingkat Pencapaian Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	50	1	Penyusunan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil	Perbub	Jumlah regulasi yang ditetapkan				1	1						BKPSDM	Seluruh Unit Kerja				
				1	Penyusunan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Manajemen Talenta di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil	Perbub	Jumlah regulasi yang ditetapkan					1	1						BKPSDM	Seluruh Unit Kerja			
d.	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat Implementasi Manajemen Talenta	50	1	Penyusunan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Pengelolaan Kinerja di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil	Perbub	Jumlah regulasi yang ditetapkan				1	1						BKPSDM	Seluruh Unit Kerja				
				1	Penyusunan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Pengelolaan Kinerja di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil	Perbub	Jumlah regulasi yang ditetapkan					1	1						BKPSDM	Seluruh Unit Kerja			
2	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks BerAKHLAK	65,00	1	Laporan hasil survey indeks BerAKHLAK dan employer engagement	SKPK	Jumlah SKPA yang melaporkan hasil survey indeks BerAKHLAK dan employer engagement			46	-	-						Bagian Organisasi Setdakab	SKPK				
				1	Fasilitasi pengisian FOI PEKPPP	SKPK	Jumlah unit kerja yang difasilitasi						3	3						Bagian Organisasi Setdakab	RSUD-Dinso-Keamatan Singkohor		
3	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Indeks Pelayanan Publik	4,01	1	Fasilitasi pengisian FOI PEKPPP	SKPK	Jumlah unit kerja yang difasilitasi				-	-							Bagian Organisasi Setdakab	RSUD-Dinso-Keamatan Singkohor			
				2	Pembinaan dalam rangka Pemanfaatan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP)	SKPK	Jumlah unit kerja yang dievaluasi						-	-						Bagian Organisasi Setdakab	RSUD-Dinso-Keamatan Singkohor		
				3	Penilaian Unit kerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP)	SKPK	Unit kerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik							-	-						Bagian Organisasi Setdakab	Tim Evaluator Kabupaten Aceh Singkil	
				4	Pendampingan dan validasi hasil PEKPPP	Laporan	Jumlah laporan hasil verifikasi penilaian unit pelayanan publik							-	-						Bagian Organisasi Setdakab	Bagian Organisasi Setdakab	
				5	Fasilitasi penyusunan dan evaluasi standar pelayanan SKPK/Cabdin/UPTD	SKPK	Jumlah unit kerja yang difasilitasi							-	-							Bagian Organisasi Setdakab	SKPK
				6	Penyusunan standar pelayanan	SKPK	Jumlah unit kerja yang memiliki standar pelayanan							-	-							Bagian Organisasi Setdakab	SKPK

4

	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		8 Pendampingan dan fasilitasi penilaian kepatuhan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik terhadap standar pelayanan dan undang-undang pelayanan publik	SKPK	Jumlah unit kerja yang dilakukan pendampingan	-	7	-	-	7	Rp14.980.985	Bagian Organisasi Setdakab	Dinaso-Dinkes-Disdikbud-Disdukcapil-DPMPTSP-Pem Smpang kanan-Pem Singkil Utara
		Menyusun laporan Survey Kepuasan Masyarakat Perkeb Ach Singkil	Laporan	Jumlah laporan hasil survey kepuasan masyarakat	-	-	1	-	1	-	Bagian Organisasi Setdakab	SKPK	


 Hj. BUPATI ACPH SINGKIL,
 AZMI

↑

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188/45/442/2023
TENTANG
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
KABUPATEN ACEH TAHUN 2023

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik

No.	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output				Jenis Kegiatan Aksi	Jumlah Anggaran	Unit / Satuan Kerja								
						Satuan	Indikator	Tw1	Tw2			Tw3	Tw4	Total	Koordinator	Pelaksana				
1	belum memadainya sarana/alat bantu penyuluhan untuk mengatasi stunting	Kelompok BKB yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah di desa lokus stunting dar. Karampung Keluarga Berkualitas	Penyediaan sarana/alat bantu penyuluhan stunting	30	Pengadaan BKB Kit Stunting	Paket	Terdistribusinya sarana BKB Kit Stunting untuk Kelompok BKB kerumaha di desa lokus stunting					30	30	30	10x	Sosialisasi	Rp770,000,000	DP3A/P2KB dan Koordinator PLKB	Ahli Gizi dan kader PKKBD, kader Posyandu, kader RGK	
2	Kurangnya langkah preventif dalam mencegah stunting seperti upaya mendeteksi sejak dini faktor-faktor penyebab stunting dimasyarakat	Calon Pengantin, Ibu hamil, Ibu Pasca Persalinan, Keluarga yang memiliki anak 0 - 23 Bulan	Pendampingan keluarga beresiko stunting oleh Tim Pendamping Keluarga	12149	Pendampingan Sasaran Calon Pengantin, Ibu hamil, Ibu Pasca Persalinan, Keluarga yang memiliki anak 0 - 23 Bulan	orang	Tersedianya Rekapitulasi laporan hasil pendampingan yang dilaporkan per tiga bulan melalui aplikasi E-Stiml					312	312	312	313	12149	Pendampingan sasaran beresiko stunting	Rp577,500,000	Koordinator PLKB	Anggota TPK
3	Kurangnya monitoring dan evaluasi kepada sasaran beresiko stunting	Calon Pengantin, Ibu hamil, Ibu Pasca Persalinan yang memiliki anak 0 - 59 Bulan	Pendampingan dan pemantauan oleh kader Tim Pendamping Keluarga	12149	Pencatatan Hasil Pemantauan Pendampingan Sasaran Beresiko Stunting	orang	Tersedianya data dan informasi terkait tentang kondisi kesehatan sasaran beresiko stunting					312	312	312	313	12149	Pencatatan hasil pemantauan sasaran beresiko stunting	Rp525,000,000	Koordinator PLKB	kader TPK
4	Kurangnya pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Tim pendamping keluarga di tingkat kecamatan	Camat, Kepala Puskesmas, Tenaga Gizi, Dokter, Bidan, PKB/PLKB, Satgas TPKS, Damrasi, Kapossek, K/UA, Kepala Desa, PPK, Kader PKKBD dan Sub PKKBD, Kader TPK, Pendamping Desa	Lokakarya Mini Kecamatan	10 x	Rapat Koordinasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendampingan sasaran beresiko stunting	kegiatan	Daftar Rencana Kerja yang akan dilakukan pengendalian dan evaluasi					2	2	3	3	10x	Rapat Koordinasi	Rp143,000,000	DP3A/P2KB	PKB/PLKB, TPK,
5	pembinaan edukasi gizi dalam rangka mencegah stunting belum optimal	Keluarga yang mempunyai anak baduta yang stunting, resiko stunting, ibu hamil	Operasional DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting)	10 x	Sosialisasi Edukasi Gizi melalui Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) oleh ahli gizi	kegiatan	Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan keluarga beresiko stunting dalam penyediaan makanan bergizi					2	2	3	3	10x	Sosialisasi	Rp770,000,000	DP3A/P2KB dan Koordinator PLKB	Ahli Gizi dan kader PKKBD, kader Posyandu, kader RGK

6	Belum Optimalnya Peran Lintas Sektor dalam percepatan penurunan Stunting	Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) lintas sektor	Susunan Keanggotaan TPPS	4x	Koordinasi, Fasilitas, evaluasi, dan pelaporan percepatan penurunan stunting	kegiatan	Laporan perkembangan percepatan penurunan stunting	1	1	1	1	1	4x	rapat koordinasi	Rp120.000,000	Ketua TPPS	Anggota TPPS
7	Kurangnya identifikasi resiko pada kelompok sasaran beresiko stunting	Calon Pengantin kekurangan energi kronis (KEK), Ibu hamil (Ih), Ibu Nifas beresiko stunting, baduta stunting	identifikasi penyebab stunting	4	Kunjungan ke rumah sasaran	lokus stunting	Kajian Audit Kasus Stunting	1	1	1	1	4x	kunjungan		Rp80.000,000	Ketua AKS	Anggota Tim AKS
8	Belum Optimalnya kajian tindak lanjut pasca audit kasus stunting	Tim Audit Kasus Stunting	Susunan Keanggotaan AKS	3	Rapat koordinasi Tim Audit Kasus Stunting	Kegiatan	Hasil rekomendasi dan kajian audit kasus stunting	-	1	1	1	3	Rapat Koordinasi			Ketua AKS	Anggota Tim AKS
9	Penyediaan Pangan Olahan Untuk Keperluan Medis Khusus	Balita Gizi Buruk	Jumlah Gizi buruk yang ditangani	35	Rapat koordinasi Formula 100, Distribusi, Penanganan Kasus, Pencatatan dan	Orang	Jumlah kasus gizi buruk yang ditangani					35	Pengadaan Formula 100 (F-100) Balita Gizi Buruk	Rp774.000,000	Dinas Kesehatan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	
10		Menurunnya angka Prevalensi Stunting yang didorong Melalui Posyandu Terintegrasi	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat untuk datang ke Posyandu	30	Rapat koordinasi Pokjamil Posyandu dan Tim Sekretnat	Orang	Jumlah yang mengikuti Rakor	24/orang	24/orang	24/orang	24/orang	116/orang	Rapat Koordinasi	Rp4.400,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	
					Pembinaan Pokjamil Posyandu Tingkat Kecamatan	Kecamatan	Jumlah Pokjamil Posyandu yang dibina		11/Kecamatan		11/Kecamatan	11/Kecamatan	Pembinaan Pokjamil Posyandu Kecamatan	Rp138.600,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	
					Pelatihan Kader KPM	Orang	Jumlah yang mengikuti pelatihan			33 / orang		33/orang	Pelatihan Kader KPM	Rp35.000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	
					Implementasi RGK	Desa	Jumlah Kampung yang dilaksanakan implementasi RGK			25 /Kampung		25 /Kampung	Pelatihan sekaligus Pemberian Makanan Tambahan melalui RGK	Rp62.500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	PKK Kabupaten	

V

					Implementasi Aku Hutanya PKK untuk Pencegahan Stunting	Kecamatan n	Jumlah Kecamatan yang dilaksanakan Implementasi Aku Hutanya PKK			11/Kecamat an		11 /Kecamatan	Pelatihan	Rp10.000.000	Dinas Pembudayaan Masyarakat dan Kampung	PKK Kabupaten
					Implementasi Pola Asuh Anak dan Remaja untuk Pencegahan Stunting	Kecamatan n	Jumlah Kecamatan yang dilaksanakan Implementasi Pola Asuh Anak dan Remaja			11/Kecamat an		11/Kecamat an	Pelatihan	Rp40.000.000	Dinas Pembudayaan Masyarakat dan Kampung Aceh	PKK Kabupaten
					Implementasi UP2K PKK untuk Pencegahan Stunting	Kecamatan n	Jumlah Kecamatan yang dilaksanakan Implementasi UP2K PKK			11/Kecamat an		11/Kecamat an	Pelatihan	Rp40.000.000	Dinas Pembudayaan Masyarakat dan Kampung	PKK Kabupaten
					Peaksanaan Kegiatan Ganmanawar 10 Program Pokok PKK untuk Pencegahan Stunting	Kecamatan n	Jumlah Kecamatan yang mengikuti Ganmanawar			1 Kecamatan		1 Kecamatan	Pembinaan	Rp65.000.000	Dinas Pembudayaan Masyarakat dan Kampung	PKK Kabupaten

REFORMASI BIROKRASI TEMA INFLASI

1	Keterjangkauan Harga [Kenaikan Harga Barang]	Pengendalian Harga Bahan Pokok/Pangan Pokok	Harga Bahan Pokok/ Pangan Pokok	HET	Pasar Murah, Pengembangan UMKM, Peningkatan Pernisi Daerah dan Membuka Lapangan Kerja untuk daya beli lebih meningkat	Harga	Terkenalinya harga sesuai Harga Eceran Tertinggi	HET	HET	HET	HET	HET	1. Pasar Murah 2. Pendidikan dan Latihan Pekoprasian Bagi Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 3. Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, pembinaan, kemudahan perizinan, penguatan kemampuan dan koordinasi dengan pemangku kepentingan 4. Pengadaan Alat Tangkap Ikan Untuk Nelayan	Rp3.170.751,636	Asisten Perkonomian & Pembangunan	Dinas Disperdag Kop&Kum
2	Ketersediaan Pasokan Bahan Pokok/Pangan Pokok/ Kabupaten Aceh Singkil Bukan daerah Produksi]	Bahan Pokok/Pangan Pokok	Barang		Gerakan Menanam Bersama Aceh Singkil (GEMERAS) Dan Gerakan Pangan Murah	Barang	Ketersediaan	200 Ha	300 Ha	300 Ha	300 Ha	1100 Ha	1. Pengadaan Penuh Paku dan Taman lain 2. pengadaan Obat-obatan pertanian 3. Pengadaan Sapi 4. Gerakan Menan di Sekolah 5. Gerakan Bersama Masyarakat	Rp2.731,546,025	Asisten Perkonomian & Pembangunan	Dinas Pangan dan DTPHP
3	Kelancaran Distribusi [Kabupaten Aceh Singkil Bukan daerah Produksi]	Beras	Harga		Subsidi transportasi	Beras	Kilogram	30.000 Kg	40.000 Kg	50.000 Kg	60.000 Kg	180.000 Kg	Subsidi Ongkos angkut Beras	Rp100.000.000	Asisten Perkonomian & Pembangunan	Dinas Perhubungan
4	Komunikasi Efektif (Faktor Cuna dan Letak Geografis Aceh Singkil yang terletak di antara Dua muara sungai yaitu Lea Cunandang dan Lea Soreva. Yang sewaktu-	Informasi	Prekuensi		Kerjasama Antar Daerah Koordinasi Lintas TPPD	Informasi	Prekuensi	60	60	60	60	60	1. Koordinasi TPPD dan Sosialisasi 2. Kerjasama Antar Daerah	Rp85.461.600	Asisten Perkonomian & Pembangunan	Bagian Perkonomi an & SDA Dinas Pangan
5	Lonjakan laju inflasi tidak stabil	Pengendalian Inflasi	Laju inflasi	11	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penunjang	Kecamatan	Operasi Pasar Murah		11 Kecamatan			11 Kecamatan	Terkait	Rp504,964,202	Dinas Perdagangan	Dinas Perdagangan

REFORMASI BIROKRASI TEMA KEMISKINAN

1	Masih tingginya angka kemiskinan sebagai akibat dampak pandemi covid, cakupan pelayanan dasar yang masih minim dan belum terintegrasinya pendataan penduduk miskin	Meningkatkan kemandirian Desa	Pembinaan dan promosi BUMK	20 BUMK	Pameran produk unggulan desa dan BUMK	Jenis produk	Jumlah produk unggulan BUMK yang di promosikan	0	0	5 jenis produk unggulan	0	5 jenis produk unggulan	Pameran	Rp250,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	DPMK															
				20 BUMK													Digitalisasi Management Pemasaran BUMK	Orang	Jumlah pengurus BUMK yang dibina	0	0	40 Orang	0	40 Orang	Pelatihan	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	DPMK			
				11 Kecamatan													Pemilihan Management Kecamatan DILMUK	Orang	Jumlah pengurus BUMK yang dibina	0	33 Orang	0	33 Orang	0	66 Orang	Pelatihan	70,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	DPMK		
				3 Desa													Borlir Khas Singkil Mikro menjadi usaha	Orang	Jumlah masyarakat miskin yang dibina	0	15 Orang	0	15 Orang	0	15 Orang	Pelatihan	40,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	DPMK		
				43,48													Facilitasi Usaha Mikro menjadi usaha	Persen	Bantuan peralatan usaha mikro	-	43	43	43	-	129	Terkait	2,139,911,600	Masyarakat Dinas Perindagkop dan LKMM	Bidang UMMKM		
				43													Facilitasi Usaha IKM	Persen	Bantuan peralatan usaha IKM	-	22	22	22	66	66	Terkait	420,652,000	Dinas Perindagkop dan LKMM	Bidang Industri		
				2													Bimtek UMMKM	Kegiatan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	-	-	1 kali	1 kali	1 kali	2 kali	Terkait	174,179,600	Dinas Perindagkop dan LKMM	Bidang UMMKM		
				3													Bimtek Koperasi	Kegiatan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	-	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	3 kali	Terkait	242,790,400	Dinas Perindagkop dan LKMM	Bidang Koperasi		
				REFORMASI BIROKRASI TEMA PADN																											
				1													Masih banyak pelaku usaha lokal belum mendaftar ke e-katalog	Peningkatan Produk dalam Negeri	Jumlah sosialisasi	11	Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Kecamatan	Jumlah sosialisasi PDN				3 kali	3 kali	Terkait	30,000,000	Dinas Perindagkop dan UKM

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

AZMI

